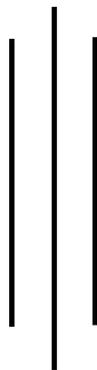




**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2027**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen Renstra akan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan selama lima tahun serta pagu indikatif yang diperlukan. Disamping itu Renstra Bappeda juga tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mendukung RPJMD tersebut. Renstra juga menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja tahunan atau Renja Bappeda yang lebih terukur dan konsisten setiap tahunnya. Selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diteruskan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kami menyadari bahwa penulisan dan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini, masih memerlukan berbagai masukan dalam upaya penyempurnaan substansi dari dokumen ini secara komprehensif dan diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan penyusunan perencanaan lanjutan lainnya.

Pematangsiantar, 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BUDI UTARI, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750501 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar yaitu fungsi penunjang perencanaan, serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sekaligus dokumen kinerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja lainnya. Dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan yang relevan dengan Rencana Strategis antara lain adalah Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pematang Siantar, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar, Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar, Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar, Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar, Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar .

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar, sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

Rencana Strategis merupakan komitmen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Pematang Siantar serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Pematang Siantar, yaitu :

“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pematang Siantar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor 7);

20. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dimaksudkan untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar;
- b. Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan, dan isu-isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar;
- c. Menampilkan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar periode sebelumnya.
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kota Pematang Siantar.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu

Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

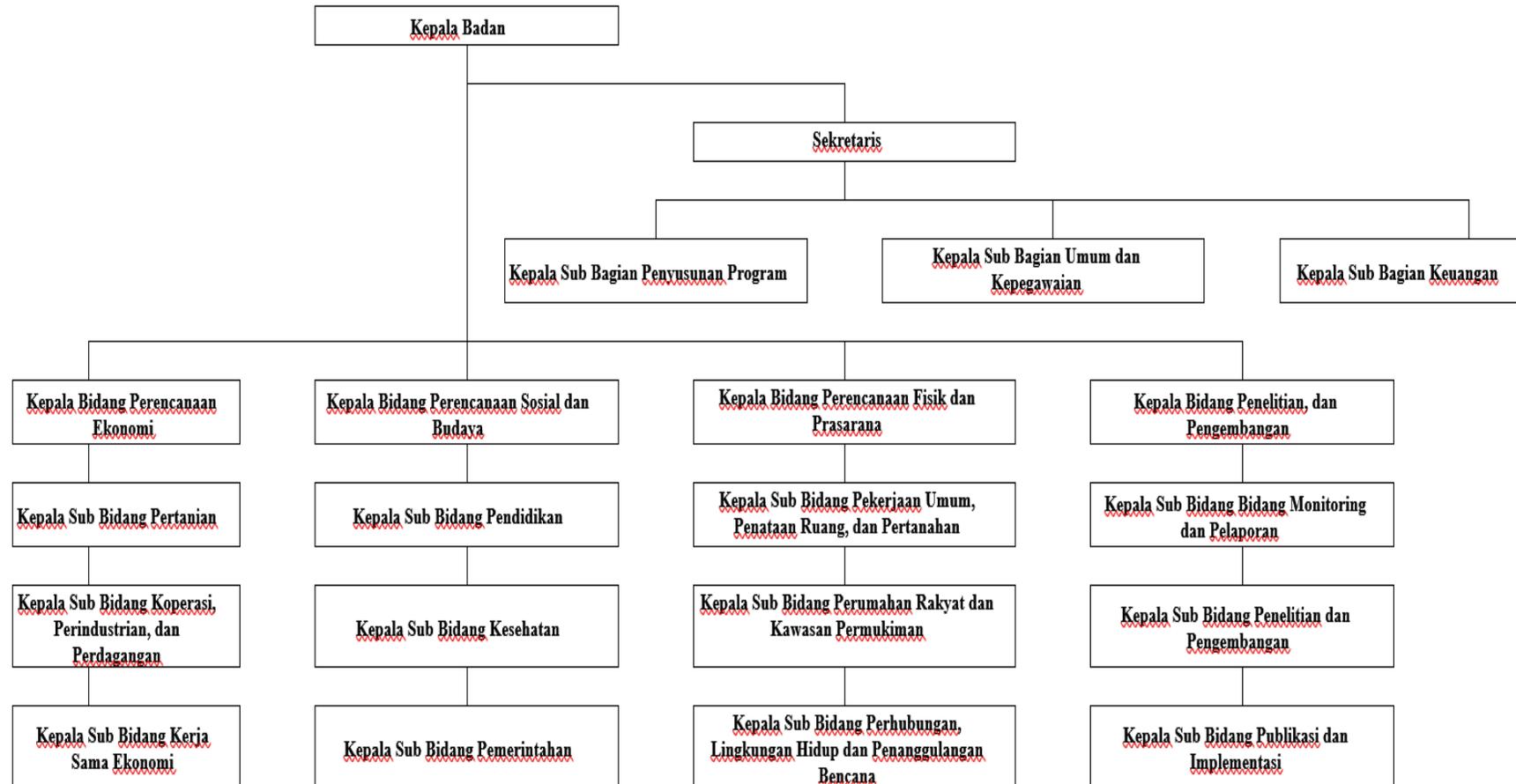
Struktur organisasi Bappeda Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian;

- b. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi
4. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan;
 - b. Sub Bidang Kesehatan;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
 5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
 6. Bidang Monitoring, Penelitian, dan Pengembangan
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Publikasi dan Implementasi.

Secara Lengkap Bagan Susunan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Pematang Siantar



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pematangsintar Nomor 05 Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis lembaga teknis daerah badan meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin seorang Sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Administrasi Perkantoran, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya, dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang. Sekretariat dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan badan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan;
- d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang di lingkungan badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
- f. Pengkoordinasian program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub

Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, sebagai berikut:

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program/kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran ketatausahaan pengagendaan surat menyurat, pendistribusian surat menyurat, hubungan masyarakat di lingkungan badan;
- b. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi aset di lingkungan badan;
- c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian dan koordinasi pembinaan pegawai di lingkungan badan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, penggajian pegawai, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan badan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan dan penganggaran pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Merumuskan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran, serta koordinasi program kegiatan pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kerjasama ekonomi.
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Pertanian

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan dan kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- 2) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan koperasi, usaha, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- 3) Sub Bidang Kerjasama Ekonomi

Sub Bidang Kerjasama Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam menyelenggarakan perencanaan kerjasama ekonomi antar pemerintah, perbankan,

lembaga keuangan, lembaga non keuangan, BUMN/BUMD, serta non pemerintah dan kerjasama ekonomi dalam urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan dunia usaha dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi keuangan dan asset daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Sosial Budaya merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Merumuskan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program/kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan.
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

1) Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata dan kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, kepegawaian daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan sosial dan tenaga kerja, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan politik, pemadam kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan penganggaran pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Merumuskan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan penganggaran serta koordinasi program/ kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
- b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, energi dan sumber daya mineral, komunikasi, informatika, statistik, persandian, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

6. Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi monitoring, dan pelaporan, perencanaan, dan penganggaran

penelitian dan pengembangan, publikasi dan implementasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi dan perumusan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian, pelaporan program/kegiatan tahunan dan lima tahunan, publikasi dan implementasi serta perencanaan dan penganggaran serta koordinasi program/kegiatan penelitian dan pengembangan.
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran unsur penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan rencana pembangunan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- 3) Sub Bidang Publikasi dan Implementasi

Sub Bidang Publikasi dan Implementasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan publikasi dan implementasi tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan laporan termasuk tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan rencana

pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

7. Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional tertentu merupakan jabatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti serta Jabatan Fungsional Lainnya yang berkaitan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.

Jenjang Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari :

- a. Perencana Pertama
- b. Perencana Muda
- c. Perencana Madya
- d. Perencana Utama

Jenjang Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Peneliti terdiri dari :

- a. Peneliti Pertama
- b. Peneliti Muda
- c. Peneliti Madya
- d. Peneliti Utama

Dalam melaksanakan tugasnya, Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti serta Jabatan Fungsional Lainnya memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan program/kegiatan yang berkaitan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kota Pematang Siantar

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah *implementator* kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kota Pematang Siantar berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Maret Tahun 2022 berjumlah 52 orang. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dan Bidang Monitoring, Penelitian dan Pengembangan. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh OPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan, sedangkan sekretariat menjalankan

peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Pematang Siantar yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
1	Eselon II	1	2,72
2.	Eselon III	5	11,36
3.	Eselon IV	2	4,55
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	13	29,55
5.	Jabatan Fungsional Umum	23	52,27

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pematang Siantar, 2022

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 23 orang (52,27%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 12 orang. Secara presentase, jumlah tersebut mencapai 27,27% dari seluruh pegawai Bappeda, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi *Think Tank*-nya Pemerintah Kota Pematang Siantar, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kota Pematang Siantar adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota
Pematang Siantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Perguruan Tinggi						
	S2	12	27,27	23,07	-	-	-
	S1	23	52,27	42,59	4	50	7,69
2.	Bukan Perguruan Tinggi						
	SMA	9	20,46	17,31	4	50	7,69
	Jumlah	44			8		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		52					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pematang Siantar, 2022

Sumber daya manusia (SDM) yang ada berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kota Pematang Siantar pada tahun 2022, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 pegawai, yang terdiri dari 27 pegawai laki-laki (61,36%) dan 17 pegawai perempuan (38,64%) dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 8 pegawai, yang terdiri dari 5 pegawai Non ASN laki-laki (62,5%) dan 3 pegawai Non ASN perempuan (37,5%). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Pematang Siantar adalah sebanyak 52 pegawai.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota
Pematang Siantar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	27	61,36	51,92	5	62,5	9,62
2.	Perempuan	17	38,24	32,69	3	37,5	5,77
	Jumlah	44			8		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		52					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pematang Siantar, 2021

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Pematang Siantar
Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
1	Golongan IV	13	29,55
	IV/c	-	-
	IV/b	2	4,55
	IV/a	11	25
2	Golongan III	24	54,55
	III/d	13	29,55
	III/c	5	11,36
	III/b	3	6,82
	III/a	3	6,82
3	Golongan II	7	15,91
	II/d	2	4,55
	II/c	3	6,82
	II/b	1	2,27
	II/a	1	2,27
	Jumlah	44	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pematang Siantar, 2022

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda, dari segi sarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja, sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Kota Pematang Siantar pun tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja. Dari segi prasarana dalam bentuk gedung dan ruangan di dalamnya sudah cukup memadai. Baik itu ruang rapat yang representatif, ruang arsip, ruang perpustakaan, dan gudang. Data sumber daya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Bappeda dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Kota Pematang Siantar Sampai Dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keadaan Barang		
				B	RB	KB
1	Stationary Generating set (Genset)	2016	1	B		
2	Stationary Water pump	2016	1	B		
3	Mini Bus	2004-2016	3	2B		1kb
4	Sepeda Motor	1989-2016	19	11	4	4
5	GPS	2015-2017	6	B		
6	Lemari Besi	2015-2016	9	B		
7	Rak besi	2016	1	B		
8	Felling Kabinet	2007 - 2016	76	35	39	2
9	Brankas	2008	1		RB	
10	Lemari Kayu	2007-2018	18	4b	14 RB	
11	Papan Tulis	2012	3		RB	
12	White Board	2009 - 2016	10	7	3RB	
13	Meja Kayu Tepat Buku	2016	2	B		

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keadaan Barang		
				B	RB	KB
14	Meja Staf	2016	50	B		
15	Meja Rapat	2016	50	B		
16	Meja Rapat Bundar	2016	5	B		
17	Meja Tulis	2006	5		5 RB	
18	Meja 1/2 Biro	2006-2009	40		40 RB	
19	Meja Biro	2012-2015	8	4 B	4RB	
20	Meja Kayu	2015	6		6 RB	
21	Meja Kerja Pejabat Es II	2012-2013	2		2 RB	
22	Meja Kerja Pejabat Es II	2016	1	B		
23	Meja Kerja Pejabat Es III	2016	5	B		
24	Meja Kerja Pejabat Es IV	2016	11	B		
25	Meja Pimpinan Rapat	2016	8	B		
26	Meja Komputer	2009-2013	6		RB	
27	Kursi Besi	2014	50	30 B	20 RB	
28	Kursi Besi Staf	2016	50	40	10	
29	Kursi Besi Putar	2016	50	40	10	
30	Kursi Besi Rapat	2016	100	95	5	
31	Kursi Rapat Meja Bundar	2016	52	45	7	
32	Kursi Putar	2009-2013	37		37	
33	Kursi Putar Rapat	2016	3	2 B		1 KB
34	Kursi Putar Rapat Tinggi	2016	5	B		
35	Kursi Lipat	2009-2014	28		28	
36	Kursi Sofa	2009 dan 2017	4	2 B	2 RB	
37	Kursi Kerja Pejabat Es II	2009	1		RB	
38	Kursi Kerja Pejabat Es II	2016	1	B		
39	Kursi Kerja Pejabat Es III		5	B		
40	Stationary Generating set (Genset)	2016	1	B		

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keadaan Barang		
				B	RB	KB
41	Kursi Kerja Pejabat Es IV		11	B	2 RB	
42	AC 1/2 PK	2011	2		RB	
43	AC 1/2 PK	2016	2	B		
44	AC 3/4 PK	2016	4	B		
45	AC 1 PK	2016	19	B		
46	AC 2 Pk	2015	1	B	1 RB	
47	AC 3/4 PK	2015	4	B		
48	AC 5 PK	2018	1	B		
49	Kipas Angin	2009-2015	10		10 RB	
50	Televisi	2008-2017	9	B		2RB
51	Sound System	2012-2016	3 set	B	1RB	
52	Camera	2011-2017	6	3 B	3RB	3 KB
53	InFokus		1		2 RB	1 KB
54	Rumah Genset		1	B		
55	PC Unit	2009-2018	8	3 B	5 RB	
56	Laptop	2006-2018	62	52 B	10 RB	
57	Note Book	2008	1		1 RB	
58	Hard Diks	2012	9	7 B	2 RB	
59	Printer		61	25 B	30 RB	6 KB
60	Pesawat Telephon		2			KB
61	Facsimile		1		RB	
62	Layar Infokus		4	B		
63	kain gorden		1 set	B		
64	Dispenar		3	2B	1 RB	
65	Tangga alumunium		1	b		
66	Lambang gemuda		1			
67	Wirelles		2	2B		
68	Stabilisator		2		2 RB	

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keadaan Barang		
				B	RB	KB
69	GPS		6	5		1
70	Braket		4	B		
71	Drone		2	B		
72	Antona parabola		1			
73	Parabola	2012	1	B		
74	stabiliti zer		2	B		
75	meteran	2017	4	B		
76	Receiver	2017	6	B		
77	mesin ketik	2009	1			rb
78	papan nama instansi	2009	1			rb
79	pinding partisi	2016	6	KB		
80	unit pauer supply (UPS)	2012-2016	5	4		1
81	loud speakeor	2012	1		RB	
82	modem	2016	1		RB	

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda dan menyatu dengan kompleks perkantoran Pemerintah Kota Pematang Siantar di Jl. Merdeka. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai

Di dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja disebutkan bahwa Setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga tiap orang yang bekerja dalam ruangan itu mendapat ruang udara (*cubic space*) yang sedikit-dikitnya 10 M³ sebaiknya 15 M³. Dengan demikian,

dilihat dari segi ketersediaan ruang kerja, gedung kantor Bappeda Kota Pematang Siantar sudah memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar sebagai salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Pematang Siantar yang mempunyai tugas sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasi penyusunan program pembangunan daerah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Pematang Siantar periode 2017-2022. Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, Konsultasi, dan Koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Capaian Kinerja Bappeda tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pematang Siantar

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTRW/RPJPD/RPJMD/RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelaksanaan <i>e-Planning</i> (3 = (1/2)*100)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Program	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
5	Tersedianya Dokumen RTRW (Perda)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda / Banyaknya	Ada/Tidak	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada / Banyaknya	Ada/Tidak	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	100	100	100	100	100
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada / Banyaknya	Ada/Tidak	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	Ada / 1	100	100	100	100	100
9	Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD (3 = (1/2)*100)	%	100	100	100	100	100	43,47	57,00	87,00	78,00	26,00	0,43	0,57	0,87	0,78	0,26

Dari hasil perbandingan capaian indikator tahun 2018-2021 dapat disimpulkan 8 indikator mencapai 100 % (mencapai target) sedangkan 1 indikator yaitu Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD tidak mencapai target akibat belum konsistennya dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, hingga Renja Perangkat Daerah.

2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Jika dilihat tren selama lima tahun terakhir, Bappeda Kota Pematang Siantar mendapat alokasi anggaran dengan cenderung menurun yakni dari sebesar Rp15.402.206.554,00 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp6.688.046.009,00 di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -24,40%. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2021 beserta serapannya sebagai tabel berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

No.	Tahun Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2017	15.402.206.554	13.584.044.086	88,19
2.	2018	12.587.556.641	11.722.973.183	93,13
3.	2019	11.244.770.336	9.693.798.858	86,21
4.	2020	7.281.180.655	6.740.598.810	92,58
5.	2021	6.688.046.009	5.848.356.371	87,44

Persentase serapan anggaran naik turun secara fluktuatif, di mana tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 93,13% dan terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 86,21%. Permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan

program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pematang Siantar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL ANGGARAN	15.402.206.554,00	12.587.556.640,50	11.244.770.336,00	7.281.180.655,00	6.688.046.009,00	13.584.044.086,00	11.722.973.183,00	9.693.898.858,00	6.740.598.810,00	5.848.356.371,00	88,20	93,13	86,21	92,58	88,58	(21,40)	(20,49)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.040.536.554,00	5.265.984.105,00	4.893.197.801,00	4.426.552.679,00		4.652.755.311,00	5.151.744.384,00	4.641.453.781,00	4.264.054.518,00		92,31	97,83	94,86	96,33		(4,05)	(2,44)
Belanja Pegawai	5.040.536.554,00	5.265.984.105,00	4.893.197.801,00	4.426.552.679,00		4.652.755.311,00	5.151.744.384,00	4.641.453.781,00	4.264.054.518,00		92,31	97,83	94,86	96,33		(4,05)	(2,44)
BELANJA LANGSUNG	10.361.670.000,00	7.321.572.535,50	6.351.572.535,00	2.854.627.976,00		8.931.288.775,00	6.571.228.799,00	5.052.445.077,00	2.476.544.292,00		86,20	89,75	79,55	86,76		(32,55)	(33,51)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	835.170.000,00	1.023.769.385,50	1.181.490.435,00	742.483.597,00		699.119.381,00	849.168.105,00	1.002.392.720,00	594.780.883,00		83,71	82,95	84,84	80,11		0,28	(0,39)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.045.000,00	2.700.000,00		100,00	100,00	99,84	100,00		(3,27)	(3,28)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	181.800.000,00	190.000.000,00	193.128.240,00	120.208.600,00		92.852.609,00	73.576.708,00	96.726.730,00	88.251.783,00		51,07	38,72	50,08	73,42		(10,53)	0,65
Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.998.746,00	10.000.000,00	9.921.868,00	47.883.374,00		14.998.746,00	9.876.334,00	9.919.448,00	46.680.700,00		100,00	98,76	99,98	97,49		116,17	112,29
Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	51.748.942,00	30.415.015,00		49.999.304,00	50.000.000,00	51.733.035,00	30.412.900,00		100,00	100,00	99,97	99,99		(12,58)	(12,58)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.500.000,00	50.000.000,00	50.092.906,00	21.074.940,00		49.497.820,00	49.029.550,00	50.046.333,00	21.056.600,00		100,00	98,06	99,91	99,91		(18,91)	(18,93)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	5.000.000,00	5.012.679,00	6.979.150,00		15.000.000,00	4.989.253,00	5.011.074,00	6.976.100,00		100,00	99,79	99,97	99,96		(9,06)	(9,03)
Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000,00	-	-	-		14.983.191,00	-	-	-		99,89	-	-	-		(33,33)	(33,33)
Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	14.995.000,00	13.750.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	8.909.000,00	12.450.000,00		100,00	100,00	59,41	90,55		47,20	29,41
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	237.920.000,00	418.779.850,00	557.650.000,00	380.850.000,00		234.450.711,00	398.436.260,00	519.760.100,00	279.470.800,00		98,54	95,14	93,21	73,38		25,82	18,05
Penyediaan Jasa Operasional THL / PNS Daerah	261.951.254,00	290.989.535,50	295.890.800,00	118.622.518,00		218.337.000,00	254.260.000,00	257.242.000,00	106.782.000,00		83,35	87,38	86,94	90,02		(15,71)	(13,62)
Program Peningkatan Sarana dan Pagarana Aparatur	955.100.000,00	365.564.150,00	505.637.600,00	71.850.000,00		795.897.300,00	264.144.026,00	284.685.800,00	63.441.525,00		83,33	72,26	56,30	88,30		(36,40)	(45,58)
Pembangunan gedung kantor	320.000.000,00	2.472.650,00	-	-		316.440.350,00	-	-	-		98,89	0,00	-	-		(66,41)	(33,33)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	332.500.000,00	202.500.000,00	272.057.600,00	-		330.153.000,00	199.840.000,00	258.229.500,00	-		99,29	98,69	94,92	-		(34,92)	(36,75)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.100.000,00	79.600.000,00	180.800.000,00	19.000.000,00		33.965.450,00	20.794.026,00	22.686.300,00	13.666.525,00		52,99	26,12	12,55	71,93		20,61	(23,15)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	80.000.000,00	52.780.000,00	52.850.000,00		18.690.000,00	43.510.000,00	3.770.000,00	49.775.000,00		62,30	54,39	7,14	94,18		44,26	420,58
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	208.500.000,00	991.500,00	-	-		96.648.500,00	-	-	-		46,35	-	-	-		(66,51)	(33,33)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	250.000.000,00	240.332.088,00	122.750.000,00		81.052.000,00	200.171.850,00	78.944.300,00	110.862.600,00		54,03	80,07	32,85	90,32		4,62	42,28
Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000,00	250.000.000,00	240.332.088,00	122.750.000,00		81.052.000,00	200.171.850,00	78.944.300,00	110.862.600,00		54,03	80,07	32,85	90,32		4,62	42,28
Program Pengembangan Data/Informasi	841.500.000,00	380.000.000,00	664.372.614,00	152.866.700,00		551.236.990,00	335.874.334,00	565.867.608,00	128.856.000,00		65,51	88,39	85,17	84,29		(19,00)	(15,94)
Penyusunan dan Penggandaan Buku Profil dan Potensi Kota Pematang Siantar	-	120.000.000,00	-	-		-	112.998.215,00	-	-		-	94,17	-	-		(33,33)	(33,33)
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	55.000.000,00	40.000.000,00	41.595.412,00	29.290.000,00		52.012.595,00	34.564.460,00	35.314.502,00	28.790.600,00		94,57	86,41	84,90	98,29		(17,62)	(16,62)
Penyusunan Data Makro Kota Pematangsiantar	100.000.000,00	100.000.000,00	-	31.048.000,00		77.831.981,00	97.999.739,00	-	29.453.600,00		77,83	98,00	-	94,86		(33,33)	(24,70)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan dan Pengadaan Leaflet Kota Pematangsiantar	50.000.000,00	-	108.050.048,00	-	-	49.162.915,00	-	100.972.478,00	-	-	98,33	-	93,45	-	-	(66,67)	(66,67)
Pengembangan Smart City	636.500.000,00	-	-	-	-	372.229.499,00	-	-	-	-	58,48	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar	-	120.000.000,00	206.675.671,00	92.528.700,00	-	-	90.311.920,00	131.458.528,00	70.611.800,00	-	-	75,26	63,61	76,31	-	5,67	(0,24)
Penyusunan profile investasi daerah	-	-	191.607.572,00	-	-	-	-	191.136.700,00	-	-	-	-	99,75	-	-	(33,33)	(33,33)
Penelitian/kajian/studi/analisa bidang politik, dan kemasyarakatan/pemerintah/ekonomi dan keuangan/pembangunan	-	-	116.443.911,00	-	-	-	-	106.985.400,00	-	-	-	-	91,88	-	-	(33,33)	(33,33)
Program Kerjasama Pembangunan	-	220.239.000,00	-	-	-	-	205.582.832,00	-	-	-	-	93,35	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	-	220.239.000,00	-	-	-	-	205.582.832,00	-	-	-	-	93,35	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.286.000.000,00	100.000.000,00	350.217.639,00	101.337.873,00	-	1.129.822.274,00	85.064.881,00	312.426.350,00	91.668.400,00	-	87,86	85,06	89,21	90,46	-	28,98	34,72
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	60.000.000,00	-	-	-	-	40.736.540,00	-	-	-	-	67,89	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Database Rakyat Miskin	200.000.000,00	-	-	-	-	197.935.000,00	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Pematangsiantar	651.000.000,00	-	-	-	-	590.087.203,00	-	-	-	-	90,64	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	75.000.000,00	-	-	-	-	60.120.599,00	-	-	-	-	80,16	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP)	300.000.000,00	-	-	-	-	240.942.932,00	-	-	-	-	80,31	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	-	100.000.000,00	175.217.639,00	101.337.873,00	-	-	85.064.881,00	151.258.650,00	91.668.400,00	-	-	85,06	86,33	90,46	-	11,02	12,81
Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Pematangsiantar	-	-	175.000.000,00	-	-	-	-	161.167.700,00	-	-	-	-	92,10	-	-	(33,33)	(33,33)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	-	-	-	-	386.202.242,00	-	-	-	-	96,55	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	-	-	-	-	386.202.242,00	-	-	-	-	96,55	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.978.300,00	-	-	-	-	99,98	-	-	-
Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.978.300,00	-	-	-	-	99,98	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.519.000.000,00	3.427.000.000,00	2.147.934.229,00	962.587.154,00	-	4.127.399.289,00	3.175.981.891,00	1.852.600.015,00	837.253.984,00	-	91,33	92,68	86,25	86,98	-	(38,89)	(39,84)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	120.000.000,00	127.200.248,00	39.375.000,00	-	43.381.939,00	105.828.929,00	117.829.916,00	32.864.700,00	-	86,76	88,19	92,63	83,47	-	25,65	27,73
Rapat koordinasi pembangunan	200.000.000,00	168.500.000,00	120.262.701,00	7.700.000,00	-	132.341.066,00	136.925.614,00	81.480.347,00	6.930.000,00	-	66,17	81,26	67,75	90,00	-	(45,99)	(42,84)
Penyusunan perubahan RKPD Kota Pematangsiantar	60.000.000,00	100.000.000,00	131.418.759,00	50.015.194,00	-	53.564.620,00	94.056.678,00	78.112.129,00	45.366.800,00	-	89,27	94,06	59,44	90,71	-	12,05	5,57
Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar	60.000.000,00	-	-	-	-	27.220.820,00	-	-	-	-	45,37	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan perubahan KUA/PPAS Kota Pematangsiantar	50.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	46.506.650,00	68.639.277,00	-	-	-	93,01	91,52	-	-	-	(16,67)	(17,47)
Penyusunan KUA/PPAS Kota Pematangsiantar	50.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	45.265.024,00	71.085.010,00	-	-	-	90,53	94,78	-	-	-	(16,67)	(14,32)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan penanggulangan Korupsi	120.000.000,00	-	-	-	-	84.495.136,00	-	-	-	-	70,41	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Rencana Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Aliran Sungai Bah Bolon di Kota Pematangsiantar	300.000.000,00	-	-	-	-	293.708.236,00	-	-	-	-	97,90	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Master Plan Persampahan	150.000.000,00	-	-	-	-	146.766.977,00	-	-	-	-	97,84	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siantar Selatan	390.000.000,00	-	-	-	-	386.230.977,00	-	-	-	-	99,03	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan	150.000.000,00	-	-	-	-	147.959.637,00	-	-	-	-	98,64	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Analisis Potensi Pariwisata Kota Pematangsiantar	200.000.000,00	-	-	-	-	197.973.700,00	-	-	-	-	98,99	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Pengembangan Sarana Prasarana Kesehatan	150.000.000,00	-	-	-	-	149.013.004,00	-	-	-	-	99,34	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan RPLJM Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022	150.000.000,00	-	-	-	-	148.893.236,00	-	-	-	-	99,26	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Kota Pematangsiantar	5.000.000,00	-	-	-	-	4.776.000,00	-	-	-	-	95,52	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD Kota Pematangsiantar	300.000.000,00	350.000.000,00	451.540.186,00	214.425.755,00	-	286.171.642,00	333.560.507,00	421.900.381,00	212.337.900,00	-	95,39	95,30	93,44	99,03	-	(2,28)	(2,21)
Kajian Lokasi Terminal Tipe C, Terminal Peti Kemas dan Terminal Agribisnis	200.000.000,00	-	-	-	-	196.556.236,00	-	-	-	-	98,28	-	-	-	-	-	(33,33)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multi Sektor Kota Siantar	100.000.000,00	-	-	-	-	97.822.513,00	-	-	-	-	97,82	-	-	-	-	-	(33,33)
Evaluasi RKPD Kota Pematangsiantar	50.000.000,00	50.000.000,00	70.610.498,00	72.978.000,00	-	34.754.642,00	43.309.158,00	59.823.600,00	66.968.300,00	-	69,51	86,62	84,72	91,77	-	14,86	24,90
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siantar Barat	390.000.000,00	-	-	-	-	382.244.977,00	-	-	-	-	98,01	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siantar Timur	390.000.000,00	-	-	-	-	386.229.236,00	-	-	-	-	99,03	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siantar Utara	390.000.000,00	-	-	-	-	381.642.236,00	-	-	-	-	97,86	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar	564.000.000,00	-	-	-	-	453.880.785,00	-	-	-	-	80,48	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Sosialisasi Perda RPJMD Pematangsiantar	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	(33,33)	-
Penerapan e-Government	-	108.000.000,00	-	-	-	-	43.309.158,00	-	-	-	-	40,10	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Sosialisasi Perda RPJMD Pematangsiantar	-	110.000.000,00	-	-	-	-	107.800.000,00	-	-	-	-	98,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Study Kelayakan Kawasan Jl. Parapat Km.7 Kota Pematangsiantar	-	150.000.000,00	-	-	-	-	91.416.245,00	-	-	-	-	60,94	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Pematangsiantar	-	250.000.000,00	-	-	-	-	146.262.482,00	-	-	-	-	58,50	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Strategis Sanitasi Kota tahun 2018-2023	-	200.000.000,00	-	-	-	-	244.934.051,00	-	-	-	-	122,47	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Perencanaan Kampung Tematik Kota Pematangsiantar	-	150.000.000,00	-	-	-	-	197.341.136,00	-	-	-	-	131,56	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Pembuatan DED Kawasan Stasiun Kereta Api Kota Pematangsiantar	-	150.000.000,00	-	-	-	-	131.805.352,00	-	-	-	-	87,87	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	-	150.000.000,00	-	-	-	-	147.546.051,00	-	-	-	-	98,36	-	-	-	(33,33)	(33,33)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum	-	200.000.000,00	-	-	-	-	147.222.458,00	-	-	-	-	73,61	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan DED Kawasan Aliran Sungai Bah Bolon	-	250.000.000,00	-	-	-	-	198.399.299,00	-	-	-	-	79,36	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Study Kelayakan Pemanfaatan Lahan Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba	-	250.000.000,00	-	-	-	-	242.583.075,00	-	-	-	-	97,03	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	-	120.500.000,00	79.643.388,00	96.499.722,00	-	-	245.706.593,00	61.172.760,00	82.047.700,00	-	-	203,91	76,81	85,02	-	(4,25)	(13,66)
Penelitian/kajian/ studi/ analisa bidang pendidikan, persampahan, transportasi dan kebijakan publik	-	100.000.000,00	-	-	-	-	86.401.687,00	-	-	-	-	86,40	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Monitoring dan Litbang	-	100.000.000,00	89.570.954,00	67.488.591,00	-	-	94.461.223,00	57.849.590,00	65.159.000,00	-	-	94,46	64,59	96,55	-	(11,69)	(8,71)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik	-	100.000.000,00	119.418.042,00	61.354.800,00	-	-	79.945.034,00	93.453.042,00	49.442.084,00	-	-	79,95	78,26	80,58	-	(9,73)	(10,07)
Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Kota Pematangsiantar	-	100.000.000,00	96.099.059,00	-	-	-	79.494.237,00	53.377.950,00	-	-	-	79,49	55,54	-	-	(34,63)	(44,28)
Penyusunan rencana aksi pencapaian RTH Publik	-	-	175.000.000,00	-	-	-	-	173.795.600,00	-	-	-	-	99,31	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siantar Selatan	390.000.000,00	-	-	-	-	386.230.977,00	-	-	-	-	99,03	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Study kelayakan pembangunan pasar kecamatan di Kota Pematangsiantar	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	199.040.600,00	-	-	-	-	99,52	-	-	(33,33)	(33,33)
Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pematangsiantar	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.323.000,00	-	-	-	-	99,32	-	-	(33,33)	(33,33)
Kajian Kebutuhan Prioritas Pembangunan Berbasis Kelurahan di Kota Pematangsiantar	-	-	130.000.000,00	-	-	-	-	129.003.600,00	-	-	-	-	99,23	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Rancangan RKPD	-	-	57.170.394,00	54.250.092,00	-	-	-	27.495.900,00	46.162.300,00	-	-	-	48,09	85,09	-	(1,70)	22,63
Evaluasi RRJMD	-	-	-	155.000.000,00	-	-	-	118.450.500,00	118.450.500,00	-	-	-	-	76,42	-	-	-
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	-	-	-	143.500.000,00	-	-	-	111.524.700,00	111.524.700,00	-	-	-	-	77,72	-	-	-
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100.000.000,00	-	-	-	-	73.479.397,00	-	-	-	-	73,48	-	-	-	-	-	(33,33)
Pembuatan Buletin Jurnal Penelitian dan Pengembangan	100.000.000,00	-	-	-	-	73.479.397,00	-	-	-	-	73,48	-	-	-	-	-	(33,33)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	815.000.000,00	375.000.000,00	331.224.010,00	66.712.495,00	-	774.711.268,00	348.005.277,00	196.151.414,00	65.462.100,00	-	95,06	92,80	59,22	98,13	-	(48,51)	(55,11)
Koordinasi dan Konsultasi Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kota Pematang Siantar	65.000.000,00	75.000.000,00	133.334.326,00	-	-	61.387.749,00	62.439.740,00	83.250.932,00	-	-	94,44	83,25	62,44	-	-	(2,28)	(21,65)
Analisis Potensi Ekonomi Kota Pematangsiantar	300.000.000,00	-	-	-	-	293.743.351,00	-	-	-	-	97,91	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan Road Map MEA Kota Pematangsiantar	150.000.000,00	-	-	-	-	144.840.402,00	-	-	-	-	96,56	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Kajian Kebijakan dan Pengembangan Sektor Informal	150.000.000,00	-	-	-	-	147.897.336,00	-	-	-	-	98,60	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kelembagaan CSR	150.000.000,00	-	-	-	-	126.842.430,00	-	-	-	-	84,56	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyusunan perencanaan pengembangan	-	200.000.000,00	-	-	-	-	195.881.190,00	-	-	-	-	97,94	-	-	-	(33,33)	(33,33)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ekonomi masyarakat																	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-	100.000.000,00	197.889.684,00	66.712.495,00	-	89.684.347,00	112.900.482,00	65.462.100,00			-	89,68	57,05	98,13		10,53	(5,38)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	860.000.000,00	674.375.244,00	148.150.588,00	-	839.467.516,00	603.195.101,00	145.976.600,00			-	97,61	89,45	98,53		(33,21)	(34,65)
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	60.000.000,00	215.291.709,00	46.151.394,00	-	54.694.519,00	146.175.601,00	43.988.200,00			-	91,16	67,90	95,31		60,09	32,45
Kajian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi ASN di Pemerintah Kota Pematangsiantar	-	150.000.000,00	-	-	-	148.802.329,00	-	-			-	99,20	-	-		(33,33)	(33,33)
Penyusunan profil gender Kota Pematangsiantar	-	150.000.000,00	-	-	-	149.086.585,00	-	-			-	99,39	-	-		(33,33)	(33,33)
Study Penyusunan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak	-	150.000.000,00	-	-	-	146.002.393,00	-	-			-	97,33	-	-		(33,33)	(33,33)
Kajian sekolah unggulan di Kota Pematangsiantar	-	200.000.000,00	-	-	-	192.945.038,00	-	-			-	96,47	-	-		(33,33)	(33,33)
Kajian kantin sekolah yang memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan	-	150.000.000,00	-	-	-	147.936.652,00	-	-			-	98,62	-	-		(33,33)	(33,33)
Kajian pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Kota Pematangsiantar	-	-	151.805.903,00	-	-	-	151.369.200,00	-			-	-	99,71	-		(33,33)	(33,33)
Kajian efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar	-	-	153.857.345,00	-	-	-	153.357.050,00	-			-	-	99,67	-		(33,33)	(33,33)
Kajian Peningkatan kualitas kesehatan berbasis lingkungan	-	-	153.420.287,00	-	-	-	152.293.250,00	-			-	-	99,27	-		(33,33)	(33,33)
Kajian Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kota Pematangsiantar	-	-	-	101.999.194,00	-	-	-	101.988.400,00			-	-	-	99,99		-	-
Program Pengembangan Sosial dan Budaya	-	-	-	119.998.481,00	-	-	-	119.787.000,00			-	-	-	99,82		-	-
Strategi peningkatan perlindungan anak dalam rangka percepatan perwujudan Kota Pematangsiantar layak anak	-	-	-	119.998.481,00	-	-	-	119.787.000,00			-	-	-	99,82		-	-
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	459.900.000,00	320.000.000,00	255.988.676,00	265.891.088,00	-	312.368.634,00	267.768.087,00	156.181.769,00	218.476.900,00		67,92	83,68	61,01	82,17		(15,52)	(5,35)
Biaya Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pematangsiantar	75.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	58.437.836,00	80.616.084,00	-	-		77,92	89,57	-	-		(26,67)	(20,68)
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	75.000.000,00	-	-	-	-	60.019.945,00	-	-	-		80,03	-	-	-		(33,33)	(33,33)
Penetapan Sosialisasi Revisi Perda Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032 tentang RTRW Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032	259.900.000,00	230.000.000,00	161.049.559,00	-	-	144.268.353,00	187.152.003,00	110.094.752,00	-		55,51	81,37	68,36	-		(47,16)	(37,15)
Kajian Rekamaya Lalu Lintas di Kawasan Pasar Dwikora	50.000.000,00	-	94.939.117,00	-	-	49.642.500,00	-	46.087.017,00	-		99,29	-	48,54	-		(66,67)	(66,67)
Koordinasi pelaksanaan program PKP Kota Pematangsiantar	-	-	-	23.908.811,00	-	-	-	20.993.800,00			-	-	-	87,81		-	-
Koordinasi penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	32.414.670,00	-	-	-	27.551.600,00			-	-	-	85,00		-	-
Penyusunan Kajian Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Kota Pematangsiantar	-	-	-	109.964.607,00	-	-	-	99.310.300,00			-	-	-	90,31		-	-
Sosialisasi Perda Perubahan Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematangsiantar	-	-	-	99.603.000,00	-	-	-	70.621.200,00			-	-	-	70,90		-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	4.732.744.676	-	-	-	-	4.523.510.171					95,58		
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	-	-	47.190.783	-	-	-	-	41.839.700					88,66		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	27.390.215	-	-	-	-	22.262.950					81,28		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	19.800.568	-	-	-	-	19.576.750					98,87		
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	-	-	-	4.182.249.093	-	-	-	-	4.060.356.292					97,09		
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	4.182.249.093	-	-	-	-	4.060.356.292					97,09		
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	-	-	-	547.264.787	-	-	-	-	408.578.450					74,66		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	6.120.985	-	-	-	-	6.105.000					99,74		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	42.019.319	-	-	-	-	41.975.750					99,90		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	13.571.513	-	-	-	-	13.271.900					97,79		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	5.125.000					93,18		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	61.886.970	-	-	-	-	61.612.900					99,56		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	418.166.000	-	-	-	-	280.487.900					67,08		
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	-	-	-	361.154.800	-	-	-	-	325.557.904					90,14		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	110.916.800	-	-	-	-	86.849.904					78,30		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	250.238.000	-	-	-	-	238.708.000					95,39		
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	-	-	-	142.150.000	-	-	-	-	95.756.275					67,36		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Dinas Jabatan	-	-	-	-	92.840.000	-	-	-	-	46.446.275					50,03		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	49.310.000	-	-	-	-	49.310.000					100,00		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	797.222.343	-	-	-	-	488.526.900					61,28		
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	-	-	-	-	705.680.476	-	-	-	-	412.559.750					58,46		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	-	-	-	-	327.171.189	-	-	-	-	304.857.900					93,18		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	378.509.287	-	-	-	-	107.701.850					28,45		
<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-	-	-	-	39.499.522	-	-	-	-	32.841.750					83,14		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan	-	-	-	-	39.499.522	-	-	-	-	32.841.750					83,14		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan Daerah																	
<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah</i>	-	-	-	-	52.042.345	-	-	-	-	43.125.400					82,87		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	52.042.345	-	-	-	-	43.125.400					82,87		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	542.914.624	-	-	-	-	374.266.200					68,94		
<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-	-	-	-	167.964.618	-	-	-	-	116.233.100					69,20		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	80.827.309	-	-	-	-	61.829.250					76,50		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	51.821.028	-	-	-	-	31.871.800					61,50		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	35.316.281	-	-	-	-	22.532.050					63,80		
<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	-	-	-	-	139.933.107	-	-	-	-	88.402.500					63,17		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	70.207.469	-	-	-	-	45.317.000					64,55		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	31.889.614	-	-	-	-	16.832.300					52,78		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	37.836.024	-	-	-	-	26.253.200					69,39		
<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-	-	-	-	235.016.899	-	-	-	-	169.630.600					72,18		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	46.846.631	-	-	-	-	31.967.400					68,24		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	17.790.883	-	-	-	-	15.646.200					87,95		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	170.379.385	-	-	-	-	122.017.000					71,61		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	67.899.579	-	-	-	-	53.474.650					78,76		
<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	-	-	-	-	67.899.579	-	-	-	-	53.474.650					78,76		
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	-	-	-	-	67.899.579	-	-	-	-	53.474.650					78,76		

Pada tahun 2017, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp15.402.206.554,00 untuk melaksanakan 11 program dan 59 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp13.584.0544.086,00 atau 88,19%. Terdapat 2 (dua) program yang dalam pelaksanaannya masuk kategori rendah karena realisasinya di bawah 66%, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Program Pengembangan Data/Informasi. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur hanya terealisasi 54,03% karena waktu yang disediakan oleh penyelenggara kursus tidak sinkron dengan waktu pelaksanaan ketugasan PNS di Bappeda. Program Pengembangan Data/Informasi hanya terealisasi 65,51% karena pada kegiatan Pengembangan *Smart City*.

Pada tahun 2018, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp12.587.556.641,00 untuk melaksanakan 9 program dan 54 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp11.722.973.183,00 atau 93,13%. Sebanyak 3 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%. Sedangkan 5 program masuk kategori tinggi dengan realisasi di atas 76% dan 1 program masuk kategori sedang dengan realisasi sebesar 72,26%, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pada tahun 2019, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp11.244.770.336,00 untuk melaksanakan 9 program dan 42 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp9.693.798.858,00 atau 86,21%. Sebanyak 5 program dalam pelaksanaannya masuk kategori tinggi dengan realisasi di atas 76%, 3 program masuk kategori sedang dengan realisasi $66\% \leq 75,99\%$, dan 1 program dengan realisasi sangat rendah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi 32,85% karena waktu yang disediakan oleh penyelenggara kursus tidak sinkron dengan waktu pelaksanaan ketugasan PNS di Bappeda.

Pada tahun 2020, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7.281.180.655,00 untuk melaksanakan 12 program dan 27 kegiatan. Pagu anggaran ini lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Bencana pandemi Covid-19 yang melanda Kota Pematangsiantar dan hampir seluruh daerah di Indonesia mengakibatkan adanya *refocusing* anggaran yang diprioritaskan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Realisasi anggaran

sebesar Rp6.740.598.810,00 atau 92,58%. Sebanyak 4 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%. Sedangkan 7 program masuk kategori tinggi dengan realisasi $87,6\% \leq 90,99\%$.

Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, sudah tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Selain itu, perencanaan tahun 2021 juga merupakan awal dimulainya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2021, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.688.046.009,00 untuk melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Realisasi Anggaran sebesar Rp5.848.356.371 atau 87,44. Pagu tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda Kota Pematangsiantar kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Pematangsiantar:

Tantangan :

1. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan perangkat daerah lain;

3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat serta pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga intitusi DPRD semakin meningkat dan beragam terhadap berbagai kebijakan perencanaan pembangunan;
4. Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal;
5. Hasil litbang yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan belum optimal atau memenuhi target;
6. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras.

Peluang :

1. Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan;
2. Bappeda sebagai koordinator dalam kemitraan-kemitraan strategis yang membantu menghubungkan instansi perangkat daerah dengan instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dan swasta, dengan menggali skema-skema kemitraan seperti CSR, Hibah, atau Obligasi Daerah;
3. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi. Optimalisasi dan integrasi sistem informasi (IT) yang sudah ada dalam proses perencanaan, pengawasan, evaluasi, penelitian, dan pengembangan sesuai fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan dan litbang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini terdapat isu-isu bersifat strategis yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas jangka menengah kedepan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kota Pematang Siantar sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah belum akuntabel	Belum Selarasnya perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 2. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti. 3. Data dan informasi belum tersedia secara memadai dan mudah diakses
		Belum efektifnya Pengendalian Pembangunan Daerah	Belum maksimalnya monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
		Hasil kajian belum dijadikan perumusan kebijakan Daerah	Kajian dan penelitian yang dilakukan belum berbasis isu strategis.
		Tata kelola pelayanan Perangkat Daerah belum berkualitas dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan publik di Perangkat Daerah belum masuk kategori baik. 2. Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah belum masuk kategori baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga akan masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan

kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan Misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

**“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera
dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industr, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.
3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan

program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai *local wisdom* dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar

2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi :Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Selarasnya perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Belum efektifnya Pengendalian Pembangunan Daerah; 3. Hasil kajian belum dijadikan perumusan kebijakan Daerah; 4. Tata kelola pelayanan Perangkat Daerah belum berkualitas dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti di Bappeda dan Perangkat Daerah Mitra; 2. Perbedaan atau perubahan periode perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota ; 3. Masih rendahnya ketersediaan data perencanaan yang lengkap, valid, dan berkesinambungan; 4. Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah 5. Belum maksimalnya monitoring, Evaluasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya diklat substansif untuk peningkatan kapasitas SDM Perencana; 2. Adanya forum koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 3. Adanya komitmen antar perangkat daerah dan dukungan teknologi informasi; 4. Adanya forum koordinasi dan dukungan data terkait isu strategis; 5. Adanya pembinaan dari APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

No.	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pembangunan daerah 6. Belum maksimalnya penelitian berbasis isu strategis daerah 7. Masih rendahnya kinerja penyelenggara n pemerintahan pada Perangkat Daerah	

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Pematang Siantar dengan Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Pematang Siantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Bappeda berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Pematang Siantar, yaitu sebagai institusi perencana pembangunan. Bappeda Kota Pematang Siantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dari ketiga sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar di atas, Bappeda Kota Pematang Siantar mendukung sasaran kedua, meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra K/L dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran Renstra Bappenas Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran renstra kementerian PPN/Bappenas dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kementerian PPN/Bappenas			
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum Selarasnya perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan atau perubahan periode perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota; 2. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti di Bappeda dan Perangkat Daerah Mitra; 3. Masih rendahnya ketersediaan data perencanaan yang lengkap, valid, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian terkait untuk memudahkan koordinasi; 2. Adanya Diklat substansif yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Sasaran Rentra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		berkesinambungan;	
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Belum efektifnya Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Belum efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah 2. Belum maksimalnya monitoring, Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Dukungan dan komitmen pimpinan dalam manajemen kinerja; 2. Adanya pembinaan internal yang dilaksanakan APIP.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri			
Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Belum efektifnya hasil penelitian	Belum maksimalnya hasil penelitian yang berbasis isu strategis	Adanya forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait dan dukungan data terkait isu strategis

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Utara

Telaah terhadap Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Tidak Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid) 2. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan masih rendah	1. Ketersediaan SDM 2. Sarana dan Prasarana mencukupi 3. Dukungan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Komitmen para kepala OPD 4. Pengawasan

	2. Belum efektifnya Pengendalian Pembangunan Daerah	3. Pengembangan SDM bagi para aparatur perencana masih terbatas; 4. Pelaksanaan Diklat/Bimtek /Pelatihan terbatas 5. Aspirasi masyarakat dan program /kegiatan belum integratif dan kolaboratif dengan fokus tema tertentu 6. Pendanaan belum optimal 1. Belum adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi; 2. Belum ada pedoman tata cara verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan	oleh BPK, BPKP dan KPK 5. Diklat dari Pusbindiklatren Bappenas dan lembaga pelatihan lainnya
--	---	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Saat ini dokumen Revisi RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 sedang dalam proses persetujuan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Dalam penyusunan dokumen Rancangan RPJMD ini tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032 dengan isu strategis sebagai berikut :

1. Sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah dan Kota Sekunder di Provinsi Sumatera Utara, menjadi penyeimbang pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki *hinterland* wilayah dataran tinggi Danau Toba;
2. Memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang dataran tinggi bukit barisan dalam wujud kesamaan iklim, kondisi alam, kegiatan produktif, dan sosial budayanya yang berarti

3. Berbagai potensi kegiatan ekonomi, social, budaya dan keagamaan serta dan pemerintahan dengan pelayanan skala wilayah dan nasional sudah berlangsung sejak dahulu, yaitu :
 - a. Kegiatan perdagangan dan jasa (komersial) perbankan, supermarket, telekomunikasi, dan pelayanan imigrasi yang memiliki jangkauan pelayanan regional
 - b. Ketersediaan kegiatan pendidikan menengah dan tinggi dan dukungan fasilitas kesehatan yang berskala regional yang menciptakan kualitas SDM yang dapat bersaing secara nasional dan internasional
 - c. Kantor pusat 4 (empat) gereja berskala nasional dan internasional memilikisejarah yang panjang di kota ini
 - d. Bangunan bersejarah budaya adat Simalungun
 - e. Kegiatan industri pengolahan beberapa produk pertanian/perkebunan yang sudah memiliki brand dan skala pemasaran nasional dan ekspor
 - f. fasilitas dan kegiatan pertahanan dan keamanan Kawasan Rindam yang sekaligus pusat pelatihan militer
4. Disamping sudah terbangun infrastruktur nasional dan wilayah, seperti : jalur Kereta Api dan jalan nasional, sudah ada rencana pengembangan infrastruktur baru lainnya, yaitu : rencana pembangunan jalur KA baru rute Merek – Pematang Siantar, pembangunan pembangunan jalan bebas hambatan Medan - Tebing Tinggi – Parapat yang menambah fungsi distribusi dan koleksi bagi Kota terhadap wilayah *hinterland* berupa angkutan barang produk-produk pertanian dari Daerah Tinggi Bukit Barisan dan transportasi transit menuju daerah tujuan wisata Danau Toba dan sekitarnya
5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Nasional Industri Hilir Produk Sawit berskala internasional di Kawasan Sei Mangkei Kecamatan Perdagangan Kabupaten yang berjarak hanya sekitar 40 Km dari Kota Pematang Siantar diharapkan mendorong perkembangan perekonomian kota melalui kegiatan jasa pendidikan, jasa konsumtif konsumsi, jasa otomotif/ transportasi dan industri turunannya dan kegiatan lainnya.
6. Rencana pembangunan jalan lingkar luar kota sebelah timur dan barat, yang dapat dikaitkan sebagai pendorong pengembangan wilayah pinggiran kota

7. Terdapat lahan ex HGU di tepi kota (Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba) menambah kawasan potensi lahan pengembangan
8. Didominasi oleh lahan pertanian (perkebunan, ladang dan sawah) yang sebagian besar diantaranya dialiri oleh jaringan prasarana irigasi teknis.
9. Tantangan pengembangan Kota Pematang Siantar dalam waktu mendatang adalah mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan fisik kota sehingga berlangsung pada lokasi yang direncanakan dengan intensitas yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Arahan pengembangan fisik wilayah kota yang mempertimbangkan :
 - a. Perkembangan fisik di kawasan pusat kota berlangsung secara intensif dengan orientasi pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian dituntut kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan tersebut sekaligus merevitalisasi kawasan pusat kota.
 - b. Perkembangan fisik di pinggiran berlangsung secara ekstensif dan sporadis. Dengan demikian dituntut kebijakan yang dapat mengarahkan perkembangan fisik secara optimal sekaligus mempertahankan lahan terbuka hijau secara terpadu.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif

penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2022-2027, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Berikut isu-isu prioritas hasil KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022- 2027, sebagai berikut:

1. Penataan Ruang
2. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Keluarga Sehat
4. Pengelolaan Pelayanan Masyarakat
5. Pertumbuhan Ekonomi Kota
6. Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam
7. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Bappeda dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah belum akuntabel;
2. Belum Selarasnya perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Belum efektifnya Pengendalian Pembangunan Daerah;
4. Hasil kajian belum dijadikan perumusan kebijakan Daerah;
5. Bappeda belum berperan sebagai *Clearing House (Perumus Kebijakan dan peraturan)*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANG SIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Pematang Siantar. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah:

- Bappeda sebagai institusi yang menjalankan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan *think tank*-nya pembangunan daerah.
- Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan

acuan/pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program pembangunan.

- Tingginya kapasitas warga Kota Pematang Siantar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Keberadaan Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i> .	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Mewujudkan perencanaan yang akuntabel	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan
Efektivitas pengendalian pembangunan daerah								Persentase capaian pembangunan daerah	
Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan								Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang Dijadikan Kebijakan Daerah	
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	
								Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Renstra (2022)	Target					Kondisi Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Perencanaan yang akuntabel	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	14,83	17	18	19	20	21	21
			Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	9,06	12	14	14,75	15	15,25	15,25
		Keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
		Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah	55 %	65 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang Dijadikan Kebijakan Daerah	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;	A	B	B	A	A	A	A
			Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	75	75	75	80	80	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda Kota Pematang Siantar mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda tahun 2022-2027 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL		FAKTOR INTERNAL		Strength (S)		Weakness (W)	
				S1	Bappeda sebagai perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi, sinergisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan	W1	kompetensi SDM belum optimal
				S2	adanya SDM yang relatif cukup banyak dan berpendidikan sarjana/pasca sarjana	W2	pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi, hasil penelitian dan pengembangan belum optimal digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
				S3	sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal	W3	belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja
Opportunities (O)				S-O			W-O
O1	Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> dalam seluruh siklus manajemen	S1 dengan O1	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis untuk mewujudkan <i>Good</i>	W2 dengan O1	Mengoptimalkan pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk		

	keperintahan		<i>Governance</i> dan <i>Clean Government</i> dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan		mendukung komitmen kepala daerah
O2	Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi	S2,S3, dengan O2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1 dengan O2	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan sarpras dalam penguasaan teknologi
O3	Masih adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan	S1 dengan O3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	W2, W3 dengan O4	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan
O4	Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan litbang	S2,S3, dengan O4	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam proses kelitbangan dan pengendalian	W1 dengan O3	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat
Threats (T)			S-T		W-T
T1	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat, kritis dan beragam	S1 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat	W1 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat
T2	Pemanfaatan terhadap produk-produk perencanaan dan kelitbangan belum optimal	S1 dengan T2	Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan dan kelitbangan.	W1 dengan T3	Meningkatkan kompetensi SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi

T3	Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat	S2, S3 dengan T3	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1, W2 dengan T2	Mengoptimalkan kompetensi SDM, pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong Pemanfaatan terhadap produk-produk perencanaan dan kelitbangan
----	--	------------------	--	------------------	--

Adapun Strategi dan Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan yang Akuntabel	1.1 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah 1.2 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada lingkup perangkat daerah	1.1.1. Peningkatan kualitas dan Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup perangkat daerah
		1.2.1 Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1.2.1.1 Perencanaan terpadu yang didukung dengan pendanaan
			1.1.1.2 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
			1.1.1.3 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
		1.1.1.4 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;	
1.1.2 Mengoptimalkan kapasitas kemampuan SDM Perencana dan Peneliti	1.1.2.1 Optimalisasi Kemampuan SDM dan Kualitas Analisis Data dan Informasi		
	1.2 Efektifitas	1.2.1 Meningkatkan	1.2.1.1 Pengendalian,

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>coorporate governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Pengendalian Pembangunan Daerah	efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu
			1.2.1.2 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
	1.3Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	1.3.1 Melaksanakan Penelitian Berbasis Isu Strategis Daerah	1.3.1.1 Peningkatan Kajian/ Penelitian
			1.3.1.2 Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022-2027 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut

Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Terwujudnya Perencanaan Yang Akuntabel			Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	Indeks	14.83	17		18		18		20		21		21		Bappeda Kota Pematang Siantar
			Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	indeks	9.06	12		14		14.75		15		15.25		15.25		Bappeda Kota Pematang Siantar
	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	Persen	n/a	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	Persen	70%	85%	1,115,000,000	90%	1,126,150,000	95%	1,137,411,500	100%	1,148,785,615	100%	1,160,273,471	100%	1,160,273,471	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan <i>perkada/perda</i>	Persen	100%	100%	605,000,000	100%	796,150,000	100%	757,411,500	100%	668,785,615	100%	680,273,471	100%	680,273,471	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	-	2 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	2 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BA	1 Berita Acara	1 Berita Acara	210,000,000	1 Berita Acara	101,150,000	1 Berita Acara	274,477,713	1 Berita Acara	175,000,000	1 Berita Acara	175,000,000	1 Berita Acara	175,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	3 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	437,933,787	1 Dokumen	448,785,615	2 Dokumen	460,273,471	5 Dokumen	460,273,471	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100%	85	250,000,000	90	180,000,000	95	230,000,000	100	280,000,000	100	280,000,000	100	280,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	90,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar								
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	-	70 Orang	95,000,000	70 Orang	65,000,000	70 Orang	65,000,000	70 Orang	115,000,000	70 Orang	115,000,000	70 Orang	115,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	-	1 Buku	75,000,000	1 Buku	25,000,000	1 Buku	75,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar						
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Dokumen	100%	100%	260,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	-	3 Laporan	120,000,000	3 Laporan	110,000,000	3 Laporan	90,000,000	3 Laporan	120,000,000	3 Laporan	120,000,000	3 Laporan	120,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	140,000,000	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	80,000,000	4 Laporan	80,000,000	4 Laporan	80,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah		Persentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	Persen	65%	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-	100%	0	Bappeda Kota Pematang Siantar
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	75%	1,017,482,391	80%	1,027,657,215	85%	1,037,933,787	90%	1,048,313,125	90%	1,058,796,256	90%	1,058,796,256	Bappeda Kota Pematang Siantar
			Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	-	90%	-	Bappeda Kota Pematang Siantar

			Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	-	90%		Bappeda Kota Pematang Siantar
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rumusan	2 Rumusan	8 Rumusan	421,601,737	8 Rumusan	421,601,737	8 Rumusan	442,053,133	8 Rumusan	452,432,471	8 Rumusan	462,915,602	8 Rumusan	462,915,602	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	73,129,979	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	-	1 Laporan	7,542,330	1 Laporan	7,542,330	1 Laporan	27,993,726	1 Laporan	38,373,064	1 Laporan	48,856,195	1 Laporan	48,856,195	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		1 Laporan	107,910,916	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		1 Laporan	10,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	64,891,111	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	1 Laporan	6,881,485	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	1 Laporan	141,245,916	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	1 Laporan	10,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Rumusan	3 Rumusan	8 Rumusan	312,880,654	8 Rumusan	323,055,478	8 Rumusan	312,880,654	Bappeda Kota Pematang Siantar						

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	-	1 Laporan	10,320,922	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	10,735,475	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	-	1 Laporan	10,032,385	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,174,824	1 Dokumen	100,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	-	1 Laporan	10,320,922	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	-	1 Laporan	10,735,475	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	-	1 Laporan	10,735,475	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	3 Rumusan	8 Rumusan	283,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1 Laporan	7,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1 Laporan	7,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1 Laporan	8,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	7,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	-	1 Laporan	7,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	-	1 Laporan	7,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar										
	Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan ngunan		Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui Kebijakan Daerah	Persen	-	65		70		75		80		85		85		Bappeda Kota Pematang Siantar

		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	60%	65%	700,000,000	70%	707,150,000	75%	864,070,000	80%	732,010,700	85%	728,422,807	85%	728,422,807	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian	-	1 Peneliti-an	50,000,000	2 Peneliti-an	250,150,000	2 Peneliti-an	589,070,000	1 Peneliti-an	257,010,700	1 Peneliti-an	200,000,000	1 Peneliti-an	200,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	94,210,700	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	239,070,000	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	150,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	14,800,000	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	1 Dokumen	148,000,000	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian	-	2 Penelitian	450,000,000	1 Penelitian	150,000,000	1 Penelitian	150,000,000	1 Penelitian	150,000,000	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	1 Dokumen	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Inovasi	-	1 Inovasi	200,000,000	1 inovasi	307,000,000	1 inovasi	125,000,000	1 Inovasi	325,000,000	1 Inovasi	528,422,807	1 Inovasi	528,422,807	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	-	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	245,000,000	1 Laporan	245,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	130,000,000	2 Laporan	212,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	230,000,000	2 Laporan	283,422,807	2 Laporan	283,422,807	Bappeda Kota Pematang Siantar
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;	Predikat	B	B		A		A		A		A		A		Bappeda Kota Pematang Siantar
			Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	75	75		80		80		85		85		85		Bappeda Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B	B	6,732,811,778	A	6,800,139,896	A	6,868,141,295	A	6,936,822,708	A	7,006,190,935	A	7,006,190,935	Bappeda Kota Pematang Siantar
			Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	75	75		80		80		85		85		85		Bappeda Kota Pematang Siantar
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persen		100%	113,741,086	100%	113,741,086	100%	113,741,086	100%	113,741,086	100%	113,741,086	100%	113,741,086	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen Dokumen	65,277,212	7 Dokumen	65,277,212	8 Dokumen	65,277,212	7 Dokumen	65,277,212	7 Dokumen	65,277,212	7 Dokumen	65,277,212	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5 Laporan	4 Laporan	48,463,874	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Keuangan	Persen	100%	100%	4,954,029,114	100%	5,266,165,257	100%	5,370,166,656	100%	5,474,199,133	100%	5,583,283,116	100%	5,583,283,116	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50 orang	48 Orang	4,934,029,114	50 Orang	5,242,405,933	50 Orang	5,347,254,052	50 Orang	5,454,199,133	50 Orang	5,563,283,116	50 Orang	5,563,283,116	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	-	5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	23,759,324	5 Laporan	22,912,604	5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	20,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100%	100%	235,000,000	100%	135,000,000	100%	140,000,000	100%	100,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	50 Paket	25,000,000	-	-	-	-	50 paket	25,000,000	50 Paket	25,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	0	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	0	10 Orang	0	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120 Orang	135,000,000	135,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100%	100%	731,444,328	100%	714,636,303	100%	694,636,303	100%	693,285,239	100%	649,569,483	100%	649,569,483	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	3 Paket	8,970,385	3 Paket	8,970,385	3 Paket	8,970,385	3 Paket	8,970,385	3 Paket	8,970,385	3 Paket	8,970,385	Bappeda Kota Pematang Siantar

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	25 Paket	70,530,395	25 Paket	85,722,370	25 Paket	65,722,370	25 Paket	64,371,306	25 Paket	65,722,370	25 Paket	65,722,370	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	15 Paket	17,984,278	Bappeda Kota Pematang Siantar										
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	200 Kotak	400 Paket	18,000,000	400 Paket	12,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	3 Paket	30,813,289	3 Paket	20,813,289	3 Paket	20,813,289	Bappeda Kota Pematang Siantar						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	100 Dokumen	20,020,350	100 Dokumen	14,953,530	100 Dokumen	14,953,530	Bappeda Kota Pematang Siantar						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200 Laporan	102 Laporan	497,642,104	102 Laporan	467,642,104	102 Laporan	467,642,104	Bappeda Kota Pematang Siantar						
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	31,483,527	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	36,000,000	1 Dokumen	10,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100%	65,000,000	100%	36,000,000	100%	15,000,000	100%	21,000,000	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	-	-	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8 Unit	50,000,000	6 unit	21,000,000	-	-	6 unit	21,000,000	-	-	-	-	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	1 Dokumen	408,037,250	1 Dokumen	409,037,250	Bappeda Kota Pematang Siantar								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-	1 Laporan	1,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	36 Laporan	142,869,250	Bappeda Kota Pematang Siantar										

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	4 Laporan	265,168,000	4 Laporan	265,168,000	4 Laporan	265,168,000	4 Laporan	265,168,000	4 Laporan	265,168,000	4 Laporan	265,168,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	225,560,000	100%	125,560,000	100%	125,560,000	100%	125,560,000	100%	225,560,000	100%	225,560,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7 Unit	22 Unit	85,440,000	22 Unit	85,440,000	22 Unit	85,440,000	22 Unit	85,440,000	22 Unit	85,440,000	22 Unit	85,440,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	165 Unit	65 Unit	40,120,000	65 Unit	40,120,000	65 Unit	40,120,000	65 Unit	40,120,000	65 Unit	40,120,000	65 Unit	40,120,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1 Unit	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Bappeda Kota Pematang Siantar
						TOTAL	9,565,294,169		9,661,097,111		9,907,556,582		9,865,932,148		9,953,683,469		9,953,683,469	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Pematang Siantar dengan Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Pematang Siantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2022-2027 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN 0	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Tahun 5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
I.	PERENCANAAN							
	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD					S		
1.	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	14,83	17	18	19	20	21	21
2.	Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	9,06	12	14	14,75	15	15,25	15,25
3.	Capaian Nilai AKIP Perangkat daerah	A	A	A	A	A	A	A
4.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	N/a	85%	90%	95%	100%	100%	100%
5.	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	55%	65%	85%	90%	95%	100%	100%
II.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1.	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui Kebijakan Daerah	-	65%	70%	75%	80%	85%	85%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN 0	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Tahun 5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD							
I.	PERENCANAAN							
1.		70%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	60%	85%	90%	95%	100%	100%	100%%
3.	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	n/a	75	80	85	90	90	90
4.	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	70	75	80	85	90	90	90
5.	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	70	75	80	85	90	90	90
II.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	60	65	70	75	80	85	85

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU/IKK	Sumber Data
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Akuntabel	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil dalam artian telah menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud; • Indikator keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, yakni SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound); • Target kinerja telah ditetapkan dengan baik, dalam artian selaras dengan RPJMD dan berdasarkan argument dan perhitungan yang jelas; • Dokumen renstra telah selaras dengan RPJMD dan telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan; • Target renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; • Publikasi Dokumen Perencanaan; • Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai; • Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja; Monitor 	Bappeda

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU/IKK	Sumber Data
				Rencana aksi secara berkala.	
1.1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)	<p>Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD $= (Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4 + Ki5 + Ki6) / 6$</p> <p>Ki1 =keselarasan sasaran = $\frac{\text{Jumlah Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki2 =keselarasan indikator sasaran = $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki3 =keselarasan target sasaran = $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki4 =keselarasan program = $\frac{\text{Jumlah Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki5 =keselarasan indikator program = $\frac{\text{Jumlah Indikator Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki6 =keselarasan target program =</p>	

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU/IKK	Sumber Data
				$\frac{\text{Jumlah Target Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%$	
1.2	Efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian pembangunan daerah		Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai dibagi Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah x 100%	
1.3	Meningkatkan penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian yang Dijadikan Kebijakan Daerah		$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Penelitian/Kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$	
1.4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Mendukung Nilai Capaian SAKIP	Capaian Nilai AKIP Perangkat daerah	
		Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	Kepmenpan no 25 tahun 2014	Capaian Nilai IKM perangkat daerah	
	Presentase Kesesuaian Dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD tahun berjalan.	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU/IKK	Sumber Data
	peraturan yang berlaku		panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)		
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU/IKK	Sumber Data	
		<p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p>	<p>perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri.Nomor 86 Tahun 2017)</p>	<p>Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD $= (Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4 + Ki5 + Ki6) / 6$</p> <p>Ki1 =keselarasan sasaran =</p> $\frac{\text{Jumlah Sasaran pada Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Sasaran pada Renstra}} \times 100\%$ <p>Ki2 =keselarasan indikator sasaran =</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada Renstra}} \times 100\%$ <p>Ki3 =keselarasan target sasaran =</p> $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran pada Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada Renstra}} \times 100\%$ <p>Ki4 =keselarasan program =</p> $\frac{\text{Jumlah Program pada Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Program pada Renstra}} \times 100\%$ <p>Ki5 =keselarasan indikator program =</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator Program pada Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Indikator Program pada Renstra}} \times 100\%$		
		<p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA</p>				
		<p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD PD bidang infrastruktur dan kewilayahan</p>				

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU/IKK	Sumber Data
				<p>Ki6 =keselarasan target program =</p> $\frac{\text{Jumlah Target Program pada Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Target Program pada Renstra}} \times 100\%$	
		Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Kajian dan Penelitian Yang Dijadikan Kebijakan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Penelitian/Kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$	

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022- 2027 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kota Pematangsiantar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini berisi penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

Dokumen Renstra Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 ini dapat dirubah atau disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perubahan atau penyempurnaan berikutnya, maka saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *coorporate governance*.

Pematangsiantar, Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BUDICUTARI, AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750501 199412 1 001